

Euforia Budaya Tionghoa

FRANS
H WINARTA



Sejak era reformasi 1998, telah terjadi perubahan drastis terhadap perkembangan budaya Tionghoa dan masyarakat Tionghoa di Indonesia. Dahulu, diskriminasi oleh negara terhadap budaya dan masyarakat Tionghoa berlangsung hampir sama dengan durasi pemerintahan Orde Baru yaitu 35 tahun. Berbagai peraturan dikeluarkan untuk mendukung diskriminasi tersebut, mulai dari peraturan pemerintah, surat edaran kabinet, Inpres, Keppres, SK menteri, Gubernur, Bupati dan lain-lain yang menunjukkan diskriminasi terhadap sekolah Tionghoa, bahasa, aksara, agama (Tao), Konghucu, Imlek, Cap Go Meh, surat bukti kewarganegaraan dan ganti nama.

Melalui perjuangan yang gigih, lama dan melelahkan selama era Orde Baru, berbagai kalangan termasuk warga negara Indonesia dari etnis Tionghoa dan etnis lain berjuang dan mendorong untuk menghapuskan diskriminasi etnis di Indonesia. Gus Dur bersama KH Said Aqil Siradj dan para aktivis pemuda Tionghoa, pengusaha muda, serta pegiat HAM mendirikan Gandhi (Gerakan Anti Diskriminasi Indonesia) yang mendeklarasikan di kediaman Gus Dur Ciganjur 6 November 1998. Program Gandhi bertujuan untuk menghapus kurang lebih 64 peraturan yang diskriminatif terhadap etnis Tionghoa dan budaya Tionghoa.

Ketika dilantik menjadi Presiden, Gus Dur memperbolehkan Imlek dan budaya Tionghoa dikembangkan secara bebas. Kemudian Presiden Megawati pada 2002 menyatakan Imlek sebagai hari libur nasional dan sampai sekarang berbagai budaya Tionghoa diperagakan seperti barongsai, liong (naga), silat, wushu, lagu dan musik Tionghoa, kursus bahasa mandarin, sekolah Tionghoa, huruf Tionghoa diperagakan di mana-mana. Euforia budaya Tionghoa, Imlek dan Cap Go Meh yang terjadi hanya kurang lebih 15 tahun setelah peristiwa Mei 1998 di Jakarta sungguh mengherankan. Perubahan sikap masyarakat yang begitu cepat tersebut dapat berakibat "counter productive" jika dirayakan secara berlebihan, demonstratif, dan tidak wajar, karena peristiwa Mei 1998 merupakan pelanggaran hak

asasi manusia yang menjadi bagian hitam dari sejarah Indonesia.

Asal Usul

Asal muasal diskriminasi etnis di Indonesia pada awalnya merupakan peninggalan politik hukum kolonial yang memecah belah masyarakat Indonesia (*divide et impera*) ke dalam 3 golongan, yaitu: Eropa, Bumiputera, dan Timur Asing. Ide diskriminasi juga tercetus dalam seminar Angkatan Darat di Lembang tahun 1966 yang menyatakan bahwa untuk meredam kebangkitan etnis Tionghoa di Indonesia, perlu diadakan larangan terhadap segala yang berhubungan dengan budaya Tionghoa. Etnis Tionghoa dianggap cenderung bersimpati kepada komunisme karena ikatan batin dengan negeri leluhur. Tuduhan seperti itu tentu saja tidak berdasar karena telah terjadi enkulturasi dan akulturasi budaya Tionghoa selama berabad-abad dengan berbagai budaya seluruh pelosok Indonesia.

Kemudian menyusul peristiwa G-30-S pada tahun 1965, menyebabkan hubungan Indonesia - RRC menjadi tegang. Hal ini disebabkan karena adanya tuduhan campur tangan RRC dalam peristiwa G-30-S tersebut. Kemudian secara irasional tuduhan ini dikaitkan dengan keberadaan masyarakat Tionghoa di Indonesia yang kemudian merembet kepada larangan terhadap berbagai hal yang berhubungan dengan budaya Tionghoa, antara lain: sekolah Tionghoa, bahasa Tionghoa, huruf Tionghoa, perayaan agama Tao di muka umum, berbagai aturan kewarganegaraan yang diskriminatif (K-I sebagai bukti verifikasi kewarganegaraan Indonesia bagi etnis Tionghoa), pembatasan-pembatasan dalam berbagai bidang.

Sebab musabab terjadinya diskriminasi terhadap budaya dan etnis Tionghoa perlu dipahami dan dipelajari generasi muda Indonesia, khususnya generasi muda etnis Tionghoa, agar sisi hitam sejarah Indonesia ini tidak terulang kembali yang dalam konsep hak asasi manusia dikategorikan sebagai "cultural genocide". Dengan mematahkan simbol-simbol budaya Tionghoa di masa lalu maka telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia (*past human rights abuses*) yang disebut "crime against humanity". Diskriminasi yang termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia ini perlu diselesaikan segera agar tidak terulang kembali di masa mendatang. Pemimpin Indonesia yang akan datang harus menghormati hak asasi manusia dan menegakkan hak asasi manusia agar bangsa dan negara Indonesia dapat berdiri sederajat dan sama dengan bangsa-bangsa beradab lainnya di dunia. Salah satu cara adalah dengan meminta maaf kepada

para korban dan keluarga pelanggaran hak asasi manusia.

Setelah hampir empat dekade terbelenggu pembatasan dan diskriminasi, budaya Tionghoa diperagakan dan dipertunjukkan begitu berlebihan baik di televisi, maupun dalam pertunjukan di berbagai daerah. Hal ini dilakukan seolah-olah tidak pernah ada sejarah diskriminasi dan penghancuran simbol-simbol budaya Tionghoa di masa lalu, begitu juga adanya tuduhan bahwa etnis Tionghoa hidup eksklusif. Kita bisa lihat sekarang etnis Tionghoa menjadi menteri, wakil gubernur, bupati, hakim, anggota DPR, presenter TV, artis, penyanyi, model, dan lain-lain yang pada era Orde Baru hampir tidak mungkin terjadi. Nyaris semua stasiun TV sekarang punya presenter etnis Tionghoa atau presenter hasil kawin campuran etnis Tionghoa dan etnis lain. Semua mengucapkan "Gong Xi Fa Cai", termasuk partai politik dan organisasi masyarakat yang dilakukan untuk menarik dukungan pemilih, khususnya yang tergolong berduit atau cu-kong. Keadaan seperti ini sudah "kebablasan" dan "berlebihan", masyarakat seperti dibius euforia Imlek dan Cap Go Meh, walaupun mungkin untuk tujuan komersial para pedagang dan media. Tentu harus diperhatikan agar euforia budaya Tionghoa khususnya Imlek dan Cap Go Meh ini jangan sampai menyinggung perasaan dan menimbulkan kecemburuan sosial, terutama dalam masa sulit di mana saudara-saudara kita sesama warga negara sedang mengalami musibah banjir, gempa, dan gunung meletus.

Euforia merupakan suatu keadaan seolah-olah dibius oleh kegembiraan sesaat. Sama seperti euforia budaya Tionghoa di Indonesia, euforia pemilihan presiden di Indonesia juga terlihat di masyarakat Indonesia. Calon presiden dipilih bukan karena kompetensi, rekam jejak, prestasi, kemampuan, potensi, kejujuran, dan integritas, melainkan lebih kepada "pencitraan". Euforia semacam itu yang menyebabkan hampir semua presiden RI habis masa jabatan dengan kurang simpatik dan kurang dihargai.

Dalam konsep pembauran, etnis Tionghoa harus aktif dalam berbagai bidang profesi dan birokrasi untuk mengabdikan kepada bangsa dan negara. Hal ini diperlukan untuk meminimalisir perbedaan dan menghargai pluralisme. Dan yang paling penting, euforia tidaklah bertahan lama, sehingga masyarakat Indonesia harus paham dan sadar agar dalam melakukan sesuatu janganlah didasarkan kepada euforia semata, tetapi didasarkan kepada sistem nilai.

PENULIS ADALAH DOSEN FAKULTAS HUKUM UPH DAN KETUA UMUM PERADIN

SUARA PEMBACA

Suara pembaca dikirim melalui email atau Faks ke redaksi, disertai alamat lengkap dan fotocopy identitas yang masih berlaku

Jangan Pilih Anggota DPR Suka Bolos

Selasa pagi (18/2) DPR menggelar Sidang Paripurna dengan agenda pengesahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2014. Di antara 560 anggota dewan, hanya 278 anggota yang mengisi daftar hadir sampai Sidang Paripurna dibuka pukul 10.45. Sedangkan 282 anggota lainnya belum mengisi daftar hadir. Tapi anehnya, meskipun anggota dewan yang hadir tidak kuorum, Sidang Paripurna tetap digelar. Padahal, batas kuorum kehadiran dalam Sidang Paripurna adalah setengah dari jumlah anggota ditambah satu orang atau 281.

Banyaknya kursi-kursi kosong dalam Sidang Paripurna DPR adalah pandangan yang lazim. Namun, rapat paripurna DPR kali ini bisa jadi yang terparah selama masa kerja DPR 2014-2019. Pasalnya, tingkat kehadiran anggota DPR merosot tajam, bahkan tak mampu mencukupi kuorum sebagai syarat dimulainya rapat.

Kurang disiplinnya anggota dewan dalam mengikuti rapat paripurna juga dikeluhkan oleh pimpinan DPR. Terlebih jelang Pemilu 2014, sebagian besar anggota dewan justru jarang hadir di DPR.

Segala cara sudah dilakukan pimpinan DPR untuk menertibkan anggota dewan yang tidak disiplin menjalankan tugasnya sebagai legislator. Salah satunya adalah dengan menggunakan *finger print scanner*. Namun ternyata, alat ini juga tidak efektif untuk mencegah kemalasan anggota dewan untuk menghadiri rapat paripurna.

Pemilu untuk memilih anggota legislatif akan digelar 9 April 2014. Terkait dengan pemilu legislatif, seluruh elemen masyarakat diminta untuk berfikir bijak dan cerdas dalam memilih anggota dewan nanti. Masyarakat jangan lagi memilih anggota dewan pemalas yang maju kembali sebagai calon legislatif di Pemilu 2014. Hal ini penting sebagai hukuman buruknya kinerja anggota DPR periode 2009-2014.

T Fachri

Awanglong No 50

Kota Samarinda, Kalimantan Timur